

Pengaruh Bantuan Sosial (BANSOS) terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2019

Khairani Alawiyah Matondang¹, Vingky Dwi Pratama², Melody Sitorus³, Eva Juli Yanti Situmorang⁴
Universitas Negeri Medan
evajuli740@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of social assistance on reducing poverty in Indonesia. The research method used is a quantitative method with data collection techniques obtained from BPS. The data analysis technique in this research uses the classic assumption test. The research results show that 1. Poverty in Indonesia from 2015 - 2019 has decreased. 2. Social assistance spending has a negative and not significant effect on the number of poor people in Indonesia.

Keyword: Social Assistance, Reduction, Poverty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bantuan sosial terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari BPS. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015 – 2019 mengalami penurunan. 2. Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Pengurangan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2012 menyatakan bahwa, Bantuan sosial (bansos) merupakan bantuan yang berjenis transfer uang, barang atau jasa yang dilakukan pemerintah pusat/daerah untuk masyarakat yang bertujuan melindungi masyarakat dari peluang terjadinya masalah sosial dan dapat menaikkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan umum masyarakat.

Bantuan sosial yaitu bentuk kebijakan perbaikan ekonomi yang menolong rumah tangga miskin mengatasi di bidang gizi, kesehatan, pendidikan, bencana alam, dan krisis ekonomi. Maksudnya, bantuan sosial tidak hanya untuk pencegahan kemiskinan, tetapi juga untuk program jaminan perlindungan untuk mengurangi kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai cukup uang, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk membuat mereka lebih kuat. Program-program ini melibatkan berbagai kelompok seperti organisasi nirlaba, sekolah, dunia usaha, dan pihak lain yang ingin membantu. Salah satu cara pemerintah menunjukkan keseriusan mereka adalah dengan

menciptakan usaha kecil yang bekerja sama dengan kelompok lain untuk membantu masyarakat. Kerja sama tim ini penting agar program dapat berjalan dengan baik.

Namun, dengan memberikan bansos kepada masyarakat secara langsung tidak dapat selalu menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan. Disalah satu negara berpenghasilan rendah yang dalam masa perubahan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Sebab, manfaatnya sangat kecil dan masyarakat miskin hanya mendapat sedikit saja. Program ini tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya menghilangkan kemiskinan dan kesenjangan dan sulit bagi pemerintah untuk menentukan siapa yang miskin karena negara ini sedang mengalami banyak perubahan.

Kemiskinan berarti tidak mempunyai uang yang cukup atau sumber daya untuk melanjutkan kehidupan yang baik. Hal ini juga berarti tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup, tidak bisa bersekolah atau mendapatkan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan, dan diperlakukan tidak adil atau tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan (United Nations, 2022). Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan harta benda atau sumber daya. Masalahnya lebih terletak pada kekurangan masyarakat yang menghambat kepuasan terhadap ketentuan-ketentuan ini. Esensi yang mendasarinya terletak pada optimalisasi utilitas dan pemanfaatan potensi yang ditawarkan oleh komoditas tertentu (Todaro & Smith, 2015). Pengentasan kemiskinan merupakan elemen penting dalam rencana pembangunan banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagaimana dinyatakan pada bentuk terjemahan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2017, pengentasan kemiskinan yaitu tujuan utama diantara 17 tujuan utama yang digariskan pada SDGs. Selain itu, untuk memastikan dedikasi yang teguh terhadap realisasi SDGs, pemerintah telah mewujudkan komitmen tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang efektivitas implementasi Pembangunan berkelanjutan 2030.

Bantuan sosial yang dilakukan pemerintah menimbulkan beberapa pro dan kontra. Seperti yang dikemukakan oleh Barrientos (2010), implementasi strategis dari program bantuan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran telah terbukti mampu memperbaiki masyarakat miskin. Sedangkan dalam bidang pengentasan kemiskinan, oleh Habibov dan Fan (2006) telah melakukan penelitian ekstensif yang menunjukkan bahwa pemerintah dalam memberikan bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin sangatlah sedikit. Dampak yang tidak wajar dari bantuan sosial terhadap pengentasan kemiskinan menunjukkan kurangnya efektivitas implementasi kebijakan sehingga berpotensi menimbulkan hambatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menganut tujuan pemberantasan kemiskinan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan tujuan utama adalah penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk perwujudannya. Hal ini juga mencakup kondisi kemiskinan ekstrem secara keseluruhan pada tahun 2024 (TNP2K, 2021). Hal ini menunjukkan semakin tingginya rasa urgensi dan memerlukan penerapan inisiatif komprehensif dan kerja sama antar pemerintah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan data komprehensif yang disediakan oleh BPS,

terlihat jelas bahwa meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan bantuan sosial selama beberapa tahun terakhir, namun sayangnya perbaikan kemiskinan di Indonesia justru melambat. Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi di negara ini masih terus berlanjut, sebagaimana diungkapkan oleh Indeks Komitmen untuk Mengurangi Ketimpangan (Indeks CRI) pada tahun 2018, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-90 dari 157 negara. Demikian pula, dalam hal alokasi pemerintah terhadap belanja sosial, Indonesia juga tidak mengalami kondisi yang lebih baik karena hanya menduduki peringkat ke-98 dalam indeks tersebut. Sayangnya, secara mengejutkan, 24 persen penduduk negara Indonesia berada diantara garis kemiskinan sehingga membuat masyarakat sangat rentan untuk kembali ke jurang kemelaratan ketika menghadapi kesulitan yang tidak terduga seperti penyakit, bencana alam, atau gangguan terhadap sumber pendapatan masyarakat itu sendiri (Bank Dunia, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antar variabel bantuan sosial (X) dengan variabel kemiskinan (Y). Objek dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui data BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan membuat program demi program salah satunya ialah dengan memberikan Bantuan sosial. Penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori masyarakat miskin berhak menerima bantuan sosial. Menurut Kemenkeu RI (2020) ,terdapat empat program bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Selain itu terdapat juga bantuan pemerintah provinsi yang memberikan bantuan sosial juga yang berasal dari APBD Provinsi.

- 1 Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan terlihat dari jumlah Penerima PKH tahun 2015 sebanyak 3,51 juta KPM menjadi 6,22 juta KPM tahun 2017, selanjutnya meningkat kembali tahun 2019 menjadi 9,84 juta KPM dengan besar bantuan yang diterima sebesar Rp1.890.000,- per tahun.
- 2 Program Indonesia Pintar (PIP) ,jumlah penerima PIP setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari jumlah penerima PIP yang diberikan kepada 16,56 juta anak pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan menjadi 18,39 juta anak. Dengan besar bantuan yang diberikan untuk anak SD sebesar 450 ribu, SMP sebesar 750 ribu dan untuk SMA sebesar 1 juta rupiah.
- 3 Program Indonesia Sehat (PIS), penerima bantuan tersebut termasuk ke dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Jumlah

penerima PBI-JKN sebesar 87,88 juta jiwa di tahun 2015 dan naik ditahun 2019 sebesar 96,51 juta jiwa.

- 4 Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), jumlah penerima manfaat bantuan sosial ini sebesar 1,2 juta ditahun 2017 meningkat menjadi 15,5 juta pada tahun 2019 dengan besar bantuan sebesar Rp110.000.

Jumlah masyarakat miskin dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah pendidik miskin mengalami penurunan dari 28,89 juta jiwa menjadi 25,14 juta jiwa. Terdapat 5 Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut BPS RI terdapat variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015-2019 yaitu bisa dilihat dari variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, rasio ini dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2015 sampai tahun 2019, PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Rasio ini dari tahun 2015 hingga tahun 2019 juga mengalami penurunan tetapi masih dalam tahap yang tidak signifikan. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Uji Asumsi Klasik

Dalam uji statistik menggunakan tiga uji asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji f, uji t dan uji koefisien determinasi (R^2), nilai probabilitas pada uji F sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 sehingga mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999312 selain itu nilai probabilitas uji t pada variabel bantuan sosial memperoleh hasil sebesar 0,1305 lebih besar dari α (10%) yang menunjukkan bahwa H_0 di terima atau bantuan sosial tidak secara signifikan memengaruhi jumlah penduduk miskin. Sedangkan variabel PBI-JKN memiliki hasil nilai probabilitas uji t sebesar 0,0000 kurang dari α (1%) yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau bantuan iuran JKN berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Selain itu variabel PDRB memiliki nilai probabilitas uji t sebesar 0,4786 lebih besar dari α (10%) yang menunjukkan bahwa H_0 diterima atau variabel PDRB tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Nilai probabilitas uji t rasio gini sebesar 0,0891 kurang dari α (10%) yang menunjukkan H_0 ditolak. Sehingga variabel rasio gini secara signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Nilai probabilitas uji t dari variabel tingkat pengangguran memiliki hasil sebesar 0,0593 atau H_0 ditolak sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka secara signifikan mempengaruhi jumlah penduduk miskin.

Interpretasi Uji Asumsi

a. Pengaruh Variabel PBI-JKN terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin dengan hasil koefisien -

0,367165. Keadaan ini menunjukkan jika jumlah PBI-JKN meningkat 1% jadi tingkat penduduk miskin akan turun sebesar 0,36%. Hasil uji ini sama dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa peningkatan dalam jumlah PBI-JKN akan mengakibatkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan kesesuaian hipotesis dan hasil uji, diperkuat oleh penelitian sebelumnya yaitu Lindiasari, Rahmadani (2019) memaparkan bahwa bantuan sosial secara signifikan berpengaruh negatif serta dengan PBI-JKN yaitu berupa bantuan sosial dengan efektivitas sebesar -0,006.

b. Pengaruh Variabel Rasio Gini terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Rasio ini signifikan berpengaruh positif pada penduduk miskin dengan hasil koefisien 0,377675. Keadaan ini menunjukkan jika rasio gini naik 1% akan mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin 0,37%. Hal ini sesuai dengan hipotesis dengan hasil uji yang mana diperkuat oleh peneliti sebelumnya oleh Putra dan Setiawan (2007) dan Wijayanto (2016) memaparkan peningkatan ketimpangan pendapatan atau rasio gini akan menyebabkan peningkatan jumlah dari penduduk miskin di Indonesia.

c. Pengaruh Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tingkat pengangguran terbuka secara signifikan berpengaruh positif pada jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar 0,008550. Keadaan ini menunjukkan jika tingkat pengangguran terbuka meningkat 1% maka jumlah penduduk miskin akan meningkat 0,008%. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh peneliti Nugroho (2015) serta peneliti Putra dan Arka (2016) yang memaparkan bahwa pengangguran berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia.

KESIMPULAN

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Terdapat lima provinsi dari seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan NTT. Namun untuk pengeluaran berupa bantuan sosial dan pengeluaran jumlah PBI-JKN mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Jumlah PBI-JKN tertinggi pada tahun 2015-2019 terlihat dari Provinsi Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Namun untuk pengeluaran dalam bentuk bantuan sosial tertinggi yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Banten, Papua, dan Papua Barat. Jumlah dari PBI-JKN berpengaruh negatif dan signifikan pada variabel tingkat penduduk miskin. Rasio ini dan jumlah pengangguran terbuka berdampak positif dan signifikan pada banyaknya penduduk miskin. Pengeluaran bantuan sosial berdampak negatif dan tidak signifikan pada banyaknya penduduk miskin di Indonesia. Sedangkan PDRB berdampak positif dan tidak signifikan pada banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Fatikhurrisqy, Bayu Dwi Kurniawan (2022). *Peran Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur Tahun 2020*. Sumbawa Barat.
- Fatih Irsyadi Muhammad (2021). *PENGARUH BANTUAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2015-2019)*. Institut Pertanian Bogor.
- Muamil Sun'an, Dkk (2021). *ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN TALIABU TAHUN 2015-2021*.
- Muh Rasyid Ridha, Dkk (2021). *PENGARUH BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA PAREPARE*. *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Rizki Zul Arfandi, Sumiyarti (2022). *DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIMPANGAN DI INDONESIA*. *Media Ekonomi*. Universitas Trisakti.
- Suarni, Dkk (2022). *PENGARUH BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TERHADAP PENGURANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARRU*. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan*. ITB Nobel Indonesia Makassar.